PRAKTIK HEGEMONI PEJAGA LAPAS TERHADAP NARAPIDANA DALAM FILM GHOST IN THE CELL KARYA JOKO ANWAR: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH

Flaviani Sabina Nuria Tutung[1], Fahmi Hamaduddin[2], Moch Reza Afriyansha M[3]

[123] Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available Juni 2026

emailpenulis
semuaditulis@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hegemoni pejabat lapas terhadap narapidana dalam film *Ghost in the Cell* karya Joko Anwar menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik dokumentasi, mencatat dan studi pustaka. Data penelitian berupa dialog, adegan, narasi, serta unsur audiovisual yang merepresentasikan relasi kuasa antara pejabat lapas dan narapidana. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi Fairclough, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni pejabat lapas direpresentasikan melalui dominasi yang dibangun secara sistematis terhadap narapidana. Pada dimensi teks, hegemoni tampak melalui dialog, tindakan, dan visualisasi ruang lapas yang menegaskan posisi dominan pejabat lapas. Pada dimensi praktik diskursif, dominasi direproduksi melalui normalisasi ketidakadilan sehingga narapidana menerima kondisi yang tidak manusiawi sebagai sesuatu yang wajar. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, film merepresentasikan ketimpangan kekuasaan dalam lembaga pemasyarakatan yang berpotensi melanggengkan penindasan. Penelitian ini juga menemukan munculnya kesadaran kolektif narapidana yang mendorong terbentuknya perlawanan terhadap sistem yang menindas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa film *Ghost in the Cell* tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media kritik sosial terhadap praktik dominasi dan ketidakadilan.

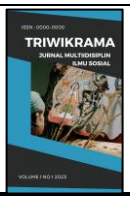
Kata Kunci: Hegemoni, Narapidana, Pejabat Lapas, Analisis Wacana Kritis, Film

A B S T R A C T

This study aims to analyze the hegemony of prison officers over inmates in Joko Anwar's film Ghost in the Cell using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis approach. The research employed a descriptive qualitative method through documentation and literature study techniques. The data consisted of dialogues, scenes, narratives, and audiovisual elements representing power relations between prison officers and inmates. Data analysis was conducted through Fairclough's three dimensions: text, discursive practice, and social practice. The findings reveal that the hegemony of prison officers is represented through systematic domination over inmates. At the textual level, hegemony is reflected in dialogues, actions, and visual representations of the prison environment that reinforce the dominant position of prison officers. At the discursive practice level, domination is reproduced through the normalization of injustice, leading inmates to perceive inhumane conditions as normal. At the social practice level, the film portrays power inequality within correctional institutions that potentially perpetuates oppression. The study also finds the emergence of inmates' collective consciousness, which encourages resistance against the oppressive system. These findings indicate that Ghost in the Cell functions not only as entertainment media but also as a medium of social criticism that exposes domination, inequality, and resistance within institutional power relations.

Keywords: *Hegemony, Inmates, Prison Officers, Critical Discourse Analysis, Film*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan seharusnya bekerja sebagai tempat rehabilitasi yang penuh kasih sayang, membantu warga binaan untuk kembali menjadi manusia yang berharga dan menjaga martabat mereka. Namun, realitas sosial dilapangan sering menunjukkan kontradiksi yang jelas, di mana kekerasan, penindasan, dan ketimpangan kekuasaan antara petugas dan narapidana masih jadi masalah sistemik yang serius di Indonesia. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengisi peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia, terdapat setidaknya 151 laporan mengenai adanya tindakan penyiksaan yang terjadi selama dua tahun terakhir.

Fakta-fakta nyata ini menunjukkan bahwa tempat-tempat penahanan masih bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan struktural, di mana hak-hak dasar para tahanan sering kali dipotong secara sembarangan. Kondisi ini semakin buruk karena fasilitas yang tidak memadai, sehingga para tahanan terpaksa hidup berdesakan di dalam ruang atau sel tahanan yang kotor, berantakan, dan tidak layak untuk tinggal, mirip dengan gambaran ekstrem seperti “rumah tikus”.

Kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan ini perlu diteliti secara mendalam karena di balik perlakuan keras, pengurangan hak, dan penderaan yang terjadi, terdapat masalah psikososial khusus berupa kepatuhan sukarela dari para tahanan. Alih-alih melakukan perlawanan besar-besaran terhadap ketidakadilan yang mereka alami, para tahanan lebih memilih menerima perlakuan itu dengan pasif. Di sinilah konsep hegemoni berjalan dengan baik, di mana pihak penjara melalui pegawainya berhasil melakukan proses penyempurnaan dan membentuk pemahaman para tahanan agar menerima kondisi tidak manusiawi tersebut sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau dianggap wajar dalam lingkungan penjara. Menurut pandangan Antonio Gramsci, hegemoni adalah bentuk penguasaan yang tidak hanya dilakukan dengan cara mengucilkan atau merendahkan secara fisik, tetapi juga melalui kesepahaman dan proses membentuk pikiran kelompok yang di bawah, sehingga nilai-nilai, aturan, serta kepentingan kelompok penguasa dianggap sebagai hal yang alami dan wajar oleh kelompok yang di bawah. Oleh karena itu, mengungkap praktik hegemoni di balik jeruji besi sangat penting agar bisa mendorong kerja sama semua pihak untuk menghentikan setiap bentuk kekerasan demi menegakkan martabat manusia.

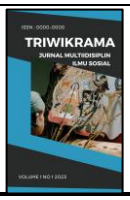
Industri kreatif salah satunya melalui media film, secara berkala mencatat, merefleksikan, dan mengkritik ketimpangan kekuasaan serta praktik hegemoni yang terjadi di dunia nyata. Film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai ruang produksi makna yang menghadirkan berbagai representasi mengenai realitas sosial. Melalui unsur visual, dialog, dan narasi, film mampu membangun pemahaman penonton terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk relasi kuasa dan praktik hegemoni.

Sejalan dengan perspektif Media and Cultural Studies, Stuart Hall (1997) menjelaskan bahwa media tidak sekadar merefleksikan realitas sosial, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk representasi atas realitas tersebut. Representasi merupakan proses produksi makna melalui bahasa, simbol, dan berbagai praktik budaya, sehingga apa yang ditampilkan media merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Dengan demikian, film tidak dapat dipandang sebagai cerminan langsung kehidupan masyarakat, melainkan sebagai media yang mengonstruksi cara pandang khalayak terhadap suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, representasi relasi kuasa antara pejaga lapas dan narapidana dalam film *Ghost in the Cell* menjadi penting untuk dianalisis guna memahami bagaimana praktik hegemoni dibangun, dinormalisasi, dan dimaknai melalui media film.

Salah satu potret sinematik terbaru yang berani menggambarkan fenomena gelap dalam institusi penahanan adalah film horor-komedi berjudul Ghost in the Cell karya sutradara Joko Anwar, yang tayang pada 16 April 2026. Uniknya, suasana yang menegangkan dalam film itu diiringi oleh lagu anak-anak “Cicak-Cicak di Dinding”, yang justru menciptakan kesan ironis, memperkuat atmosfer horor, serta memainkan perasaan penonton.

Dengan menggambarkan perilaku pejabat lapas yang memperparah penderitaan tahanan dan mengurangi hak-hak mereka atas tempat tahanan yang layak, film ini memberikan kritik sosial yang jelas terhadap permasalahan korupsi dan ketimpangan kekuasaan. Film ini juga menunjukkan bagaimana hegemoni membentuk cara pikir tahanan untuk menerima ketidakadilan yang terjadi di sistem struktural tersebut.

Banyak penulis penelitian sebelumnya sudah mempelajari hubungan antara kekuasaan dan praktik hegemoni dalam film-film, menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dipelopori oleh Norman Fairclough, Contohnya: Mulyono (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “Maskulinitas Hegemonik sebagai Panoptikon dalam Film The Whale (2022)” berhasil menjelaskan bagaimana konsep maskulinitas hegemonikl berfungsi sebagai alat pengawasan simbolik dan cara menundukkan diri sendiri, melalui aspek teks, cara berbicara, serta kebiasaan sosial dan budaya. Selanjutnya, Ni'am dan As`adi (2026) menggunakan model tiga dimensi Fairclough untuk menganalisis bentuk kritik sosial terhadap praktik oligarki yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat umum



dalam film dokumenter berjudul "Pesta Oligarki" yang dibuat oleh Watchdoc Documentary. Cara yang sama juga digunakan oleh Utami (2025) dalam film "Sang Kiai", di mana ia menganalisis hubungan kekuasaan, ideologi, serta nilai sosial dan budaya masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Selain itu, Anggria (2025) dalam film "Kupu-Kupu Kertas" juga menganalisis bagaimana kekuasaan dan perbedaan ideologi digambarkan secara interpretatif dan reflektif.

Penelitian tentang model AWK Fairclough dalam konteks film ini kemudian diperkaya oleh Saniah (2022) melalui karyanya yang berjudul "Diskursus Kapitalisme Pengawasan (Analisis Wacana Kritis Model Fairclough dalam Film The Social Dilemma)", yang membahas bagaimana industri digital membentuk hegemoni dan sistem pengawasan berbasis kapitalisme. Akhirnya, Putra dan Siregar (2026) juga menerapkan pendekatan yang sama untuk menganalisis film dokumenter "Dirty Vote" yang dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi narasi tunggal yang digunakan pemerintah.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya sudah menunjukkan bahwa Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough sangat cocok untuk mengungkap hubungan kekuasaan dan praktik hegemoni yang muncul dalam media film, kebanyakan penelitian tersebut tetap fokus pada aspek politik makro seperti oligarki, gender seperti maskulinitas, atau konteks sejarah perang. Sebaliknya, penelitian yang secara khusus menekankan praktik hegemoni di dalam lingkup institusi mikro yang tertutup dan terisolasi seperti lembaga pemasyarakatan masih sangat terbatas. Maka, penelitian yang secara khusus membahas cara pejabat penjara menguasai tahanan dalam film Ghost in the Cell masih belum banyak ditemukan. Ini adalah keunikan dari penelitian ini, yaitu dengan memilih objek berupa film terbaru karya Joko Anwar dan fokus penelitian pada cara kekuasaan dijalankan melalui tindakan penindasan, pembatasan hak, serta pembentukan ketaatan narapidana terhadap kondisi yang tidak manusiawi. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, yaitu AWK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan mendalam tentang praktik hegemoni yang dilakukan oleh pejabat lapas terhadap narapidana dalam film Ghost in the Cell karya Joko Anwar, dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi analisis Fairclough, yaitu analisis teks, analisis praktik diskursif, dan analisis praktik sosial untuk memahami bagaimana hubungan kekuasaan dan wacana yang mendominasi dibentuk, dipertahankan, dan dianggap normal dalam struktur film.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough. Fokus penelitian ini adalah praktik hegemoni pejabat lapas terhadap narapidana dalam film Ghost in the Cell karya Joko Anwar. Objek dalam penelitian ini adalah film Ghost in the cell. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial untuk mengkaji bagaimana hegemoni dibangun, dipertahankan, dan dinormalisasi melalui wacana yang muncul dalam film tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, mencatat dan studi pustaka. Data primer diperoleh dari film *Ghost in the Cell* berupa dialog, narasi, adegan, ekspresi visual, serta unsur audiovisual yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, artikel, dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan teori hegemoni, analisis wacana kritis Norman Fairclough, serta isu pemenuhan hak narapidana. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan analisis Fairclough, yaitu analisis teks untuk mengidentifikasi makna yang terkandung dalam dialog, narasi, dan adegan film, analisis praktik diskursif untuk melihat proses produksi dan konsumsi wacana, serta analisis praktik sosial untuk memahami keterkaitan wacana dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

HASIL PEMBAHASAN

Hegemoni Pejabat Lapas dalam Film *Ghost in the Cell*

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, praktik hegemoni pejabat lapas dalam film *Ghost in the Cell* karya Joko Anwar direpresentasikan melalui tiga dimensi analisis, yaitu dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bagaimana relasi kuasa antara pejabat lapas dan narapidana dibangun, dipertahankan, hingga akhirnya mengalami pergeseran melalui munculnya kesadaran kolektif para narapidana.

Hegemoni Pejabat Lapas pada Dimensi Teks

Pada dimensi teks, hegemoni pejabat lapas direpresentasikan melalui dialog, tindakan, serta visualisasi ruang penjara yang memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pejabat lapas dan narapidana. Sejak awal film, Lapas Labuhan Angsana digambarkan sebagai ruang yang penuh tekanan, ketidakadilan, dan kekerasan. Narapidana ditempatkan dalam kondisi yang tidak layak, sementara pejabat lapas memiliki otoritas penuh terhadap seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam penjara.





Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Representasi visual dalam film memperlihatkan bagaimana narapidana hidup di lingkungan yang kumuh, sempit, dan penuh konflik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pembatasan hak-hak dasar narapidana yang seharusnya tetap dipenuhi meskipun mereka sedang menjalani masa hukuman. Sementara itu, pejabat lapas ditampilkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi para tahanan.

Selain melalui visual, praktik hegemoni juga tampak melalui penggunaan bahasa yang bersifat instruktif dan penempatan narapidana sebagai pihak yang harus tunduk terhadap otoritas lapas. Dalam berbagai interaksi, narapidana tidak diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan ataupun menolak kebijakan yang diterapkan. Posisi tersebut memperlihatkan adanya dominasi yang dibangun melalui praktik komunikasi sehari-hari.

Temuan ini menunjukkan bahwa bahasa dan visual dalam film tidak hanya berfungsi sebagai unsur naratif, tetapi juga menjadi alat untuk merepresentasikan relasi kuasa antara kelompok dominan dan kelompok subordinat. Dengan demikian, pada level teks, hegemoni pejabat lapas direpresentasikan melalui berbagai bentuk komunikasi yang menegaskan posisi superior pejabat lapas dan posisi subordinat narapidana.

Praktik Diskursif dalam Pembentukan Kepatuhan Narapidana

Pada dimensi praktik diskursif, film *Ghost in the Cell* menunjukkan bagaimana dominasi pejabat lapas tidak hanya dijalankan melalui kekerasan atau ancaman fisik, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran yang membuat narapidana menerima kondisi yang ada sebagai sesuatu yang wajar. Wacana yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari di lapas mengonstruksikan bahwa penderitaan, keterbatasan fasilitas, serta perlakuan tidak adil merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap narapidana.



Melalui proses yang berlangsung secara terus-menerus, narapidana akhirnya menyesuaikan diri dengan sistem yang ada dan menerima berbagai bentuk penindasan tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi bekerja secara halus melalui proses normalisasi sehingga kelompok yang tertindas tidak lagi mempertanyakan ketidakadilan yang mereka alami.

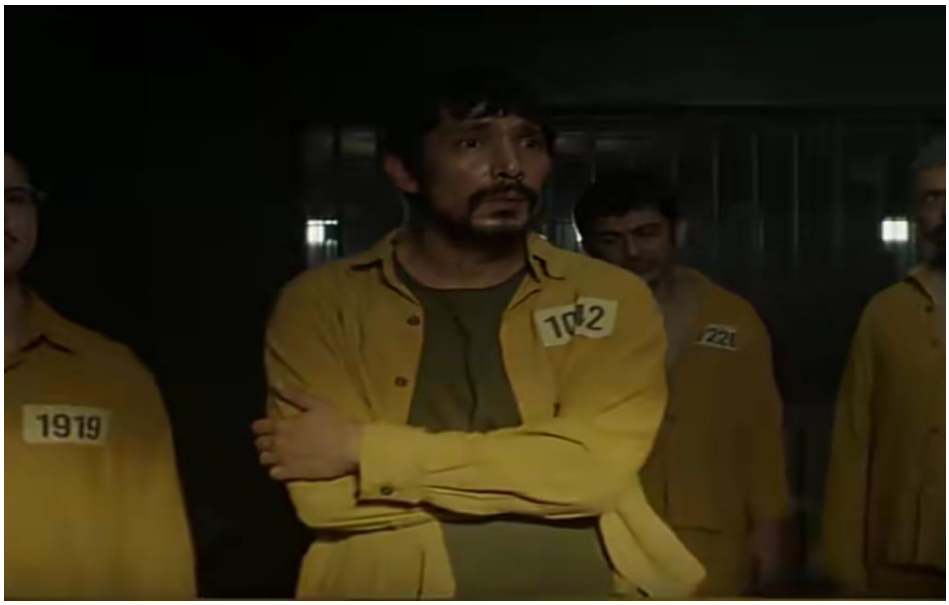
Namun, situasi mulai berubah ketika muncul teror dari entitas gaib yang membunuh para narapidana dengan aura negatif. Kehadiran hantu tersebut menciptakan wacana baru yang mengubah pola pikir para penghuni lapas. Jika sebelumnya kehidupan penjara dipenuhi oleh

kekerasan, permusuhan, dan perilaku destruktif, maka setelah munculnya teror tersebut para narapidana mulai berusaha mengubah perilaku mereka menjadi lebih positif.

Perubahan perilaku tersebut menunjukkan adanya pergeseran wacana dari budaya kekerasan menuju budaya refleksi diri. Narapidana mulai mempertanyakan berbagai nilai yang selama ini mereka terima serta menyadari bahwa kehidupan yang dijalani di dalam lapas tidak sepenuhnya harus tunduk pada logika penindasan. Dalam konteks ini, praktik diskursif menunjukkan bagaimana sebuah wacana dapat diproduksi, direproduksi, dan bahkan ditantang oleh pengalaman baru yang dialami oleh individu maupun kelompok.

Praktik Sosial dan Munculnya Kesadaran Kolektif

Pada dimensi praktik sosial, film *Ghost in the Cell* merepresentasikan kritik terhadap relasi kekuasaan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan. Penjara tidak hanya digambarkan sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai ruang yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan sosial.

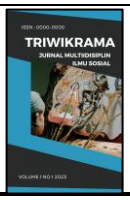


Praktik hegemoni yang dilakukan pejabat lapas menunjukkan bagaimana institusi dapat menciptakan kondisi yang membuat kelompok tertentu kehilangan kemampuan untuk menolak atau mempertanyakan ketidakadilan yang mereka alami. Narapidana menerima berbagai bentuk pembatasan dan penindasan karena menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan penjara.

Namun demikian, perkembangan alur cerita menunjukkan bahwa dominasi tersebut tidak bersifat permanen. Ancaman dari entitas gaib secara tidak langsung mendorong para narapidana untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan mereka. Kesadaran tersebut kemudian berkembang menjadi kesadaran kolektif yang mendorong mereka untuk saling membantu, bekerja sama, dan membangun solidaritas.

Persatuan para narapidana menjadi titik penting dalam film karena menunjukkan adanya perubahan dari kepatuhan menuju perlawanan. Jika sebelumnya mereka menerima penindasan sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, maka pada tahap ini mereka mulai menyadari bahwa perubahan hanya dapat dilakukan melalui tindakan kolektif. Kesadaran tersebut menjadi bentuk perlawanan terhadap dominasi yang selama ini diterima tanpa kritik.

Dalam perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai munculnya *counter-hegemony* atau hegemoni tandingan. Kelompok subordinat yang sebelumnya menerima nilai dan kepentingan kelompok dominan mulai membangun kesadaran baru yang memungkinkan mereka menentang sistem yang menindas. Oleh karena itu, film ini tidak hanya



menggambarkan bagaimana hegemoni bekerja, tetapi juga menunjukkan bagaimana dominasi tersebut dapat digugat melalui solidaritas dan kesadaran kolektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, film *Ghost in the Cell* karya Joko Anwar menunjukkan praktik hegemoni pejabat lapas terhadap narapidana melalui relasi kuasa yang dibangun secara sistematis pada dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada dimensi teks, hegemoni ditampilkan melalui dialog, tindakan, dan visualisasi lingkungan lapas yang menegaskan posisi dominan pejabat lapas serta posisi subordinat narapidana. Pada dimensi praktik diskursif, dominasi tersebut direproduksi melalui proses normalisasi yang membuat narapidana menerima berbagai bentuk ketidakadilan sebagai kondisi yang wajar. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, film menggambarkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam lembaga pemasyarakatan yang berpotensi melanggengkan penindasan terhadap kelompok yang lebih lemah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hegemoni tidak bersifat permanen. Munculnya kesadaran kolektif di kalangan narapidana mendorong terbentuknya solidaritas dan perlawanan terhadap sistem yang menindas, yang dalam perspektif Gramsci dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni tandingan. Dengan demikian, film *Ghost in the Cell* tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media kritik sosial yang mengungkap praktik dominasi, ketidakadilan, serta kemungkinan munculnya perlawanan melalui kesadaran dan tindakan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyono, J. M. D. (2025). *Maskulinitas Hegemonik sebagai Panoptikon dalam Film The Whale (2022)(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)* (Doctoral dissertation, Widya Mandala Surabaya Catholic University).

Ni'am, M. K., & As'ad, M. (2026). KRITIK SOSIAL TERHADAP OLIGARKI DALAM FILM DOKUMENTER "PESTA OLIGARKI" KARYA WATCHDOC DOCUMENTARY: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, *4*(1), 294-308.

Utami, E. A. (2025). Praktik wacana dalam film Sang Kiai menunjukkan relasi kekuasaan, ideologi, dan nilai Sosial-Budaya, ditinjau melalui pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(04), 522-531.

Anggria, F. (2026). KEKUASAAN DAN KONFLIK IDEOLOGI DALAM FILM KUPU-KUPU KERTAS: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, *11*(1), 198-207.

Saniah, J. (2022). *Diskursus Kapitalisme Pengawasan (Analisis Wacana Kritis Model Fairclough dalam Film The Social Dilemma)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Putra, M. R. A., Siregar, I., Jahiddin, I., Pandapotan, L. W., & Yusepa, I. (2026). Film Dokumenter Dirty Vote 02: Bentuk Perlawanan terhadap Narasi Tunggal Rezim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, *7*(1), 310-322.